

# Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dabulon dalam Bingkai Otonomi Daerah



**Meta Deskripsi:** Artikel ini membahas pemberdayaan Pemerintahan Desa Dabulon dalam bingkai otonomi daerah, mengulas pengertian otonomi daerah, dasar hukum yang relevan, sasaran otonomi daerah terhadap desa, serta memuat pernyataan Kepala Desa Dabulon, Anuar Sadat, tentang pentingnya penguatan kapasitas desa.

Dabulon, Minggu ( 11/05/2025 ); Otonomi daerah memberikan ruang besar bagi desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Desa Dabulon, Kecamatan Lumbis sebagai bagian dari wilayah administratif di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, turut mengaktualisasikan semangat otonomi daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks ini, pemberdayaan Pemerintahan Desa Dabulon menjadi strategi penting untuk memastikan kemandirian desa secara administratif, sosial, dan ekonomi.

**Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, tujuan otonomi daerah adalah:

- **Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat** agar kebutuhan dan aspirasi lokal lebih cepat terpenuhi.

- **Memberdayakan daerah** untuk memanfaatkan segala potensi ekonomi, sosial, budaya, dan sumber daya alam setempat.
- **Meningkatkan partisipasi masyarakat** dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Dalam penerapannya, otonomi daerah mengamanatkan pembagian kewenangan yang lebih besar kepada daerah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, guna mengatur urusan domestik tanpa tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.

Dalam kerangka otonomi daerah, desa menjadi subjek penting yang diberikan **kewenangan lokal berskala desa** untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Sasaran otonomi daerah terhadap desa meliputi:

1. **Penguatan Kewenangan Asal Usul;** Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan berdasarkan hak asal-usul, seperti adat istiadat, kelembagaan tradisional, dan wilayah.
2. **Pengelolaan Kewenangan Lokal Berskala Desa;** Desa berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan lokal seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur sederhana, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa.
3. **Pemberdayaan Masyarakat Desa;** Otonomi desa diarahkan untuk mendorong inisiatif masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan desa.
4. **Peningkatan Kemandirian Ekonomi Desa;** Melalui program Dana Desa dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
5. **Pelayanan Publik yang Lebih Cepat dan Efektif;** Dengan desentralisasi kewenangan, pelayanan administrasi kependudukan, pemberdayaan kesehatan masyarakat, pendidikan non-formal, serta layanan sosial lainnya bisa lebih cepat dan sesuai kebutuhan warga.
6. **Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa;** Desa diharapkan membangun sistem pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya dan dana publik.

Pemberdayaan desa dalam bingkai otonomi daerah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**
  - Menjelaskan konsep otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
2. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**
  - Menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa**

- Menjabarkan lebih rinci pelaksanaan hak dan kewenangan desa.

#### 4. **Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

- Mengatur prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Sebagai bentuk nyata implementasi otonomi daerah, Desa Dabulon telah mengembangkan beberapa langkah strategis:

- **Optimalisasi Layanan Administratif;** Pemerintah Desa Dabulon mempercepat layanan administrasi seperti surat-menyurat kependudukan dan pelayanan sosial berbasis sistem informasi desa.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;** Melalui pelatihan rutin dan bimbingan teknis, aparat desa dibekali keterampilan pengelolaan administrasi, keuangan, serta perencanaan pembangunan desa.
- **Partisipasi Masyarakat;** Pemerintah desa mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes) dan perencanaan pembangunan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terakomodasi.
- **Transparansi Keuangan Desa;** Melalui papan informasi desa dan website resmi desa, penggunaan dana desa diumumkan secara terbuka kepada publik.

Saat dikonfirmasi oleh kontributor Sriwidadi melalui pesan singkat WhatsApp, Kepala Desa Dabulon, Anuar Sadat, menyampaikan:

*"Otonomi daerah adalah peluang besar bagi desa kami untuk lebih mandiri. Pemerintah Desa Dabulon terus berkomitmen meningkatkan kapasitas internal dan memperluas partisipasi masyarakat agar pemerintahan desa benar-benar menjadi milik rakyat. Kami tidak hanya menjalankan kewenangan administratif, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi desa dari potensi lokal."*

*(Anuar Sadat, Kepala Desa Dabulon)*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Desa Dabulon memahami dan mengaplikasikan konsep otonomi daerah bukan hanya sebagai beban administratif, melainkan sebagai ruang kreatif untuk membangun desa yang lebih maju dan sejahtera.

Meski banyak kemajuan, Pemerintahan Desa Dabulon juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses teknologi informasi, dan kebutuhan akan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Ke depan, diharapkan:

- Dukungan program-program pemberdayaan desa dari tingkat kabupaten hingga pusat semakin diperkuat.
- Digitalisasi layanan desa terus dikembangkan untuk mendukung transparansi dan pelayanan publik yang lebih efektif.
- Masyarakat Dabulon lebih proaktif berpartisipasi dalam pembangunan dan pengawasan jalannya pemerintahan desa.

Dalam bingkai otonomi daerah, Desa Dabulon telah membuktikan diri sebagai salah satu desa yang berupaya mengoptimalkan segala potensi dan kewenangan yang diberikan. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat, harapan menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera semakin nyata.